

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF LAUK PAUK DI UNIVERSITAS TADULAKO

Margareta Yenni Indriasari

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This study aims to identify and study the Policy Implementation Incentives Lauk Pauk at the University Tadulako. The research method is qualitative research, with informants of 9 (nine), informants were selected based on purposive. Collecting data in this study begins with the observation (observation), interviews, and documentation. The results of the study explained that, Policy Implementation Incentives Lauk Pauk at the University Tadulako not going well "because of the four dimensional researched field, there are three dimensions that are not going well, that" (1) The communication has not done well, where socialization policy of the Ministry of Finance No. 110/PMK.05/2010 on Procedures for Granting and Payment of Eating for civil servants have not been socialized to lecturers and university officials Tadulako, as a result of the policy is not well understood by lecturers and officials, especially the dilution mechanism, (2) desposisi aspect has not gone well, because the use of the software manual is an absolute requirement for dilution, but attendance can be engineered true, the University has not yet estimate Tadulako back absent digital fingerprint attendance list. (3) The structure of the bureaucracy is not going well, because the Standard Operating Procedures (SOP) on implementation Tadulako money eating yet, consequently frequent delays in the disbursement.

Keywords : Policy, Implementation and Incentives.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menegaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, maka pegawai negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja yang dimulai pada fase penerimaan hingga memasuki masa purna bakti. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pembinaan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pengembangan dengan penuh pertimbangan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan dan motivasi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa selain gaji dan tunjangan lainnya kepada pegawai negeri sipil juga diberikan

uang makan atau yang sering disebut juga dengan tunjangan lauk pauk Pegawai Negeri Sipil. Pemberian uang makan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai yang kemudian secara otomatis akan meningkatkan kinerja pegawai.

Universitas Tadulako sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, tentunya memiliki jumlah pegawai yang cukup besar. Untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam lingkungan Universitas Tadulako, pegawai diberikan insentif Lauk Pauk. Dalam pemberian lauk pauk di Universitas Tadulako memiliki beberapa persyaratan, salah satu persyaratan adalah daftar hadir pegawai, hanya saja pegawai banyak yang tidak mengetahui persyaratan tersebut karena : (1) peraturan pemberian insentif lauk-pauk tidak pernah disosialisasikan kepada pegawai, (2) Sumber daya manusia belum ada dalam mengelola Insentif Lauk Pauk, (3) Komitmen pimpinan dalam pemberlakuan persyaratan

daftar hadir masih lemah, (4) Aturan teknis *Standard Operating Proceasures* (SOP) untuk pemberian lauk pauk di Universitas Tadulako belum ada, pencairan hanya berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, (5) Struktur birokrasi pengelola insentif lauk pauk belum jelas sehingga pengelola hanya diserahkan pada bagian Perbendaharaan Non Penerimaan Negara Bukan Pajak akibatnya pencairan dana lauk pauk sering terlambat dan tidak ada ketetapan waktu penerimaan. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan kajian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Lauk Pauk di Universitas Tadulako"

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan induktif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa penelitian Kualitatif Deskriptif memaparkan keadaan di lapangan berdasarkan data dari fakta yang ada.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Universitas Tadulako, dengan pertimbangan Universitas Tadulako memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak yang tersebar di 10 (sepuluh) Fakultas, 1 (satu) Pascasarjana dan 2 (dua) Biro, terutama dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Lauk Pauk di Universitas Tadulako yang belum berjalan dengan baik (hasil observasi tanggal 19 November 2014).

Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) dan Sugiyono (2006:156) menyatakan, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari data dapat yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Informan dengan cara wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. 2) Data sekunder adalah data yang berguna bagi peneliti karena data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh di lapangan, seperti arsip, data statistik, serta dokumen-dokumen pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Lauk Pauk Pada Universitas Tadulako.

Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan pada penelitian ini terdiri dari Eselon II, Dosen dan Pegawai di lingkungan Universitas Tadulako.

Teknik Penentuan Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2006:216). Dalam arti peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun orang-orang yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari Eselon II, Dosen dan Pegawai di lingkungan Universitas Tadulako.

Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian (Moh. Nazir 2005:112). Pengumpulan data merupakan unsur penting dalam

melaksanakan penelitian ilmiah, adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data diperoleh dalam bentuk data-data kualitatif yang dideskripsikan dengan kalimat menurut kategori yang menghasilkan suatu kesimpulan, dengan tahapan sebagai berikut : 1) Reduksi Data, 2) Displai Data, 3) Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang memiliki Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako senantiasa diperhadapkan pada tuntutan agar dapat mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan organisasi ini tentulah bukan sebuah hal yang mudah, karena harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, termasuk di antaranya adalah mengupayakan terwujudnya pegawai yang berkualitas yang memiliki kinerja yang baik. Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako merupakan pelaku kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama memiliki tupoksi pengelola keuangan yang ada di Universitas Tadulako, sehingga diperlukan perhatian khusus kepada kesejahteraan pegawai melalui pemberian Insentif sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai.

1. Komunikasi

Berkenaan dengan pemberian uang makan yang dibayarkan berdasarkan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di hari kerja, maka pemberian uang makan hanya dapat dilakukan jika disertakan rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil selama satu bulan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan

Serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Seharusnya penerimaan uang makan diterima setiap bulan namun kenyataannya dalam pelaksanaan di lapangan tidak jarang ditemukan kendala-kendala dalam proses pembayaran uang makan tersebut, seperti keterlambatan pembayaran dan absensi yang tidak sesuai dengan kehadiran sebenarnya. Keterlambatan pemberian uang makan disikapi oleh dosen maupun pegawai dengan sering menyalahkan kata salah satu informan. Pegawai maupun Dosen penerima uang makan yang terlambat tidak atau belum tentu memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga menimbulkan berbagi penafsiran, hal tersebut terjadi karena kebijakan tersebut kurang dikomunikasikan atau tidak pernah disosialisasikan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan satu kebijakan, maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, salah satu program untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, melalui program pengembangan SDM. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menangani beragam jenis tugas dan menerapkan kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat bermanfaat, dalam mengelola suatu program termasuk program insentif lauk pauk/uang makan di Universitas Tadulako.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan uang makan, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena rata – rata pegawai keuangan berijasah sarjana (S1) bahkan sudah banyak yang berijasah (S2), sehingga tugas seperti pengelolaan uang makan dapat dilaksanakan dengan baik. Pendapat senada datang dari informan lain yang mengatakan bahwa untuk pengelolaan uang makan dapat dilaksanakan dengan baik,

karena persyaratan dan pengelolaannya sangat sederhana yaitu daftar hadir. Hanya saja yang sering membuat terlambat adalah data dari Fakultas dan unit lainnya dalam lingkungan Universitas Tadulako akibatnya untuk pencairan setiap bulan sering mengalami keterlambatan. Sudah cukup bisa melaksanakan kebijakan, karena penilaiannya hanya berdasarkan kehadiran saja bukan dinilai dari kinerjanya.

3. Desposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya. Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:162) : "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik". Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Menurut informan bahwa pemberian isentif lauk pauk/uang makan di lingkungan Universitas Tadulako dilihat dari

aspek komitmen atau sikap pegawai pengelola, cara kerjanya sangat lambat sehingga pencairannya juga dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, disebabkan karena proses administrasi dari Fakultas terutama kelengkapan persyaratan dimasukan kepusat sering terlambat. Selain itu sistem absensi manual yang digunakan oleh Universitas Tadulako sebagai persyaratan pemberian lauk pauk/uang makan masih bisa dimainkan, sehingga tidak adil bagi pegawai yang rajin dan menguntungkan bagi pegawai yang malas, absen yang digunakan masih manual.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2002:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". "Standard Operational Procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150)

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa "Standard Operational Procedure (SOP) sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-

tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan”.

Menurut informan dari dosen maupun pegawai, bahwa pencairan atau pemberian uang makan bagi pegawai/dosen dilingkungan Universitas Tadulako sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan PMK Nomor : 110/PMK.05/2010 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “uang makan diberikan berdasarkan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan”. Pemberian lauk pauk atau uang makan pencairannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila melanggar ketentuan yang ada, maka uang akan dikembalikan pada Kas Negara, yang menjadi masalah sekarang adalah pencairan dana uang makan tidak menggunakan *Standard Operational Procedure* (SOP) Universitas Tadulako, karena SOP untuk pengelolaan uang makan di Universitas Tadulako belum dibuat. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa Universitas Tadulako dalam proses pencairan terhadap uang makan bulanan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Tadulako belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena SOP tentang pengelolaan uang insentif lauk pauk/uang makan di Universitas Tadulako belum ada, sehingga pegawai dan dosen baik yang malas maupun yang rajin berhak menerima lauk pauk dengan ketentuan bahwa memenuhi persyaratan absensi, walaupun sebenarnya absensi manual sebagai persyaratan banyak direkayasa seperti banyak ditemui dalam penelitian bahwa banyak tanda tangan yang dipalsukan (yang menandatangani absensi dari teman sejawat bahkan ada tanda tangan yang dirapel sekaligus), namun tidak mendapatkan sanksi dibekukan pemberian uang makan, malah sebaliknya kalau uang makan dibekukan sedangkan absensi terpenuhi, maka ditakutkan akan ada tuntutan dari pegawai dan dosen, itulah sebabnya sehingga diperlukan aturan tersendiri *Standard Operational Procedure*

(SOP) yang menguatkan aturan PMK Nomor: 110/PMK.05/2010.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari keseluruhan uraian pada tesis ini, maka dikemukakan jawaban permasalahan penelitian yang menjelaskan bahwa “Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Lauk Pauk di Universitas Tadulako belum berjalan dengan baik” karena dari 4 dimensi yang diteliti di lapangan, ada 3 dimensi yang tidak berjalan dengan baik, yaitu :

1. Aspek komunikasi belum dilaksanakan dengan baik, dimana sosialisasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi PNS belum pernah disosialisasikan kepada dosen dan pegawai Universitas Tadulako, akibatnya kebijakan tersebut belum dipahami betul oleh dosen maupun pegawai terutama mekanisme pencairannya.
2. Aspek desposisi belum berjalan dengan baik, karena penggunaan absensi manual merupakan persyaratan mutlak untuk pencairan, padahal absensi tersebut bisa direkayasa kebenarannya, pihak Universitas Tadulako belum menganggarkan kembali daftar hadir absen digital fingerprint.
3. Aspek Struktur Birokrasi belum berjalan dengan baik, karena *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang pelaksanaan uang makan di Universitas Tadulako belum ada, akibatnya sering terjadi keterlambatan dalam pencairannya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan peneliti “Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Lauk Pauk di Universitas Tadulako”, maka disarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya komitmen dan ketegasan dari Pimpinan kepada seluruh Fakultas maupun unit kerja di lingkungan Universitas Tadulako untuk mensosialisasikan setiap kebijakan yang akan diterapkan di Universitas Tadulako sehingga dosen maupun pegawai memahami kebijakan tersebut dan menjalankan dengan penuh disiplin.
2. Meningkatkan kesadaran yang tinggi dari setiap pegawai dan dosen untuk melakukan absensi tepat waktu pada jam datang dan pulang di hari kerja mengingat pembayaran uang makan dilakukan berdasarkan daftar kehadiran pada hari kerja.
3. Diharapkan adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang mekanisme pemberian uang makan di Universitas Tadulako sehingga termuat aturan pemberlakuan sanksi yang tegas bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Tadulako yang terlambat hadir pada jam kerja yang telah ditentukan, dengan menunda pemberian uang makan.
4. Merekomendasikan dalam setiap perencanaan anggaran dalam hal pengadaan mesin absensi digital (fingerprint) bagi beberapa Fakultas maupun unit kerja yang masih menggunakan absensi secara manual, sehingga terdapat keseragaman di seluruh Lingkungan Universitas Tadulako.
5. Dengan adanya keseragaman penggunaan mesin digital fingerprint diharapkan dapat dibangun jaringan online ke Bagian Keuangan, Sub Anggaran, khususnya pada pembuat daftar gaji pegawai. Sehingga proses pemberian dan pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Tadulako dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Dirdja N. Jahya, M.Si dan Ibu Dr. Ani Susanti, M.Si. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama ini yang telah banyak memberikan bantuan sampai tulisan ini selesai. Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Direktorat Jenderal Nomor Per-12/PB/2007 *tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 *tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 *tentang Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 *tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo. Jakarta.